

RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2025



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah.....	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	9
2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD	11
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	14
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	15
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	15
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	15
3.3. Program dan Kegiatan	17
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	22
BAB V PENUTUP.....	24
5.1. Catatan Penting.....	24
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	24
5.3. Rencana Tidak Lanjut	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. OPD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Tulang Bawang dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.

Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang 2023-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun ke-3 perencanaan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang yang berpedoman pada RPD 2023-2026.

Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai Acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai dasar pokok pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan dari Renstra PD dan bahan tolok ukur untuk mencapai target dari Renstra Perangkat Daerah;
3. Sebagai bahan monitoring/evaluasi Rencana Kerja tahun 2025;
4. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BABII	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4.	Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
BABIII	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja PD
BABIV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024, pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang mendapat total alokasi anggaran Rp 9,463,471,757 (sembilan milyar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) ,yang bersumber APBD Kabupaten Tulang Bawang, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 9,463,471,757 (sembilan milyar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 0 yang dijabarkan dalam 3 (tiga) program 8 (delapan) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan.

Sedangkan pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2023 serta Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.16.0000/001/2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA- SKPD) Tahun Anggaran 2023, alokasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp 9.707.575.220 terdiri dari Belanja Operasi Rp 9.707.575.220 dan Belanja Modal sebesar Rp 0 dan dijabarkan dalam 3 (tiga) program, 9 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 96,84 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 96,04 %.

Realisasi anggaran dan kinerja tahun lalu/Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian tahun berjalan/Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD Dinas Perhubungan Tulang Bawang sampai dengan tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (outcome) dan SubKegiatan (output),	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(3)	(4)	(5)						(8)	(9)	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator kinerja kegiatan Dinas Perhubungan yang tercapai	100 persen	100 persen				100 persen		
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 persen	100 persen				-		
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24 laporan	6 laporan	6 laporan	1 laporan	17	-	-	-
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Dinas Perhubungan	100 persen	91,70%				100 persen		
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	124 orang	31 orang	31 orang	31 orang	100	31 orang	31 orang	100
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16 laporan	4 laporan	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	84	81				82		
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	80 paket	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 orang	1 orang	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	76 persen	70 persen				72 persen		
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	-	-	-
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	44 paket	7 paket	7 paket	6 paket	85.71	8 paket	3 paket	37.50
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	-	-
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	3 paket	3 paket	5 paket	166.67	3 paket	2 paket	66.67
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	-	-	-
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	84 laporan	18 laporan	18 laporan	19 laporan	105.56	20 laporan	1 laporan	5.00

2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Perhubungan	46 persen	40 persen				40 persen		
2.15.01.2.06.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	1 paket	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen				100 persen		
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	48 laporan	12 laporan	12 laporan	10 laporan	83.33	12 laporan	12 laporan	100.00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Perhubungan dalam kondisi baik	91 persen	80 persen				83 persen		
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	56 unit	14 unit	14 unit	14 unit	100	14 unit	10 unit	71
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	-	-	-
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	24 unit	12 unit	15 unit	-	-	-	-	-
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 persen	100 persen				100 persen		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang laik fungsi	86 persen	80 persen				80 persen		
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	532 unit	442 unit	-	-	-	-	-	-
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	4283 unit	1033 unit	1033 unit	878 unit	85.00	1050 unit	980 unit	93.33
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Angkutan Umum dan Barang yang lulus uji berkala kendaraan bermotor	39 persen	35 persen				36 persen		
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	12500 unit	2300 unit	2500 unit	2500 unit	100	3000 unit	3000 unit	100
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	35 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100	9 unit	9 unit	100
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/	Persentase Ruas Jalan Kabupaten/Kota yang Telah Dilakukan MRL	100 persen	100 persen				100 persen		
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pengelolaan pelayaran	100 persen	100 persen				100 persen		
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani	Persentase Kapal yang Memiliki Izin Pengoperasian Angkutan Penyeberangan	52 persen	40.5 persen				50 persen		
2.15.03.2.07.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	48 laporan	12 persen	12 laporan		100	12 laporan	12 laporan	33.33

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja PD dan Renstra PD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu adanya keterbatasan pegawai, adanya rasionalisasi anggaran serta belum berfungsinya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Untuk kinerja pelayanan di bidang penyelenggaraan transportasi, pemerintah daerah belum mempunyai legalitas yang mendukung atau belum diaturnya petunjuk pelaksana atas perubahan beberapa peraturan perundangan di tingkat nasional yang mengatur tentang urusan Perhubungan. Belum adanya standar tentang layanan transportasi yang mengatur tentang tata cara berlalu lintas, maka dalam menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, menggunakan tolak ukur dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026. Selanjutnya kajian terhadap capaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Derajat Kejenuhan Jalan			0,40	0,35	0,30	0,25	0,39	0,38	0,37	0,35	
2	Persentase Wilayah Alur Sungai yang Terlayani Angkutan Perairan			25%	25%	30%	30%	22%	22%	22%	22%	
3	Nilai/ Predikat SAKIP Dinas Perhubungan			60	65	70	75	65,16	-	67	70	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dinas Perhubungan didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan- permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan;
2. Kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan sebagainya;
3. Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum, adapun faktor yang mempengaruhinya karena tingkat pengetahuan dan disiplin supir angkutan yang rendah;
4. Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Tulang Bawang seperti marka, rambu-rambu, RPPJ dan paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan banyak yang rusak karena kecelakaan;
5. Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas;
6. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan di Kabupaten Tulang Bawang, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit) sementara Pemerintah Daerah kesulitan dalam pembebasan lahan untuk menambah ruas jalan yang baru;
7. Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, faktor yang mempengaruhinya adalah banyaknya pengguna transportasi umum yang beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilai tidak cukup nyaman.
8. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum yang berkapasitas besar, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi;

9. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi prioritas bagi pemangku kebijakan;
10. Belum mantapnya manajemen kepengusahaan angkutan kota, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah masih banyaknya pribadi /orang per orang yang mengelola usaha angkutan kota yang dilakukan secara tradisional;
11. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
12. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan perairan, karena kurangnya kesadaran para pengguna angkutan terhadap pentingnya keselamatan angkutan perairan serta kurangnya anggaran untuk mengembangkan potensi angkutan perairan di Kabupaten TulangBawang.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah serta terhadap capaian program nasional. Masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam jangka waktu 4 tahun mendatang adalah:

1. Peningkatan dan Pengembangan kualitas sumber daya aparatur bidang Transportasi;
2. Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Penjabaran program kegiatan berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2025 serta hasil analisa kebutuhan Dinas Perhubungan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.6.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025				Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2025			
		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
2.15 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	70	4,604,857,518		Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	65	4,735,568,315
2.15 . 01. 2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	19,500,000		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	6,270,000
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tulang Bawang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 laporan	19,500,000	Kab. Tulang Bawang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 laporan	6,270,000
2.15 . 01. 2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran Dinas Perhubungan	100%	4,200,468,618		Persentase realisasi anggaran Dinas Perhubungan	100%	4,384,420,715
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Perhubungan)	Kab. Tulang Bawang	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 laporan	779,025,000	Kab. Tulang Bawang	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 laporan	779,025,000
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tulang Bawang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 orang/ bulan	3,421,443,618	Kab. Tulang Bawang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 orang/ bulan	3,605,395,715
2.15 . 01. 2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	83	18,128,000		Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	83	3,650,000
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tulang Bawang	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 orang	18,128,000	Kab. Tulang Bawang	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 orang	3,650,000
2.15 . 01. 2. 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	74%	88,242,000		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	74%	58,702,700
2.15 . 01. 2. 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tulang Bawang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1,763,200	Kab. Tulang Bawang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1,763,200
2.15 . 01. 2. 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	22,262,000	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	13,921,000
2.15 . 01. 2. 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1,080,500	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1,080,500
2.15 . 01. 2. 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	3 paket	25,000,300	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	20,150,000
2.15 . 01. 2. 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perhubungan	22 laporan	38,136,000	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perhubungan	20 laporan	21,788,000
2.15 . 01. 2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	130,830,800		Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	144,450,800
2.15 . 01. 2. 08 . 02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	47,070,800	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	47,070,800
2.15 . 01. 2. 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	83,760,000	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	97,380,000

2.15 . 01. 2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Perhubungan dalam kondisi baik	89%	147,688,100		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Perhubungan dalam kondisi baik	89%	138,074,100
2.15 . 01. 2. 09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	129,218,100	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	129,218,100
2.15 . 01. 2. 09 . 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tulang Bawang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	21 unit	18,470,000	Kab. Tulang Bawang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	21 unit	8,856,000
2.15 . 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	5,006,106,900		Persentase Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	5,084,348,200
2.15 . 02. 2. 01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Persentase Penyelesaian Rencana Induk Jaringan LLAJ yang Terpadu dan Tersosialisasi	100%	10,000,000		Persentase Penyelesaian Rencana Induk Jaringan LLAJ yang Terpadu dan Tersosialisasi	100%	3,600,000
2.15 . 02. 2. 01 . 04	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten /Kota	12 dokumen	10,000,000	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten /Kota	1 dokumen	3,600,000
2.15 . 02. 2. 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang laik fungsi	84%	4,839,606,900		Persentase peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang laik fungsi	82%	4,854,248,200
2.15 . 02. 2. 02 . 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	110 unit	4,839,606,900	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	110 unit	4,854,248,200
2.15 . 02. 2. 05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Angkutan Umum dan Barang yang lulus uji berkala kendaraan bermotor	38%	72,500,000		Persentase Angkutan Umum dan Barang yang lulus uji berkala kendaraan bermotor	38%	152,500,000
2.15 . 02. 2. 05 . 01	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3500 unit	57,500,000	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3500 unit	137,500,000
2.15 . 02. 2. 05 . 07	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	15,000,000	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	15,000,000
2.15 . 02. 2. 06	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Ruas Jalan Kabupaten/Kota yang Telah Dilakukan MRLL	100%	84,000,000		Persentase Ruas Jalan Kabupaten/Kota yang Telah Dilakukan MRLL	100%	74,000,000
2.15 . 02. 2. 06 . 04	Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	84,000,000	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	74,000,000
2.15 . 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			100%	50,000,000			100%	25,000,000
2.15 . 03. 2. 07	Penetapan Lintas Penyeberangan Dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kapal yang Memiliki Izin Pengoperasian Angkutan Penyeberangan	51,4%	50,000,000		Persentase Kapal yang Memiliki Izin Pengoperasian Angkutan Penyeberangan	51,4%	25,000,000
2.15 . 03. 2. 07 . 02	Pengendalian Dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan Dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	50,000,000	Kab. Tulang Bawang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	25,000,000

Hasil analisa kebutuhan merupakan usulan program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat Forum Perangkat Daerah, sehingga terjadi perbedaan rincian dengan Rancangan Awal RKPD. Selain terjadi perbedaan pada besaran anggaran tiap kegiatan, juga terdapat perbedaan pada rincian output serta jumlah target kegiatan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Dinas Perhubungan didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, tema yang diangkat yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Untuk itu kebijakan di tahun 2025 diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan dengan arah kebijakan:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan keterampilan;
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur, termasuk infrastruktur konektivitas, transisi energi, dan pengelolaan sampah;
3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Menurunkan tingkat kemiskinan;
6. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka;
7. Meningkatkan rasio gini;
8. Menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 yang telah dirumuskan dalam Rancangan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 salah satunya adalah **“Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan”**.

Untuk mewujudkan tujuan diatas telah ditetapkan sasaran pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah;
2. Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup;
4. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang;
5. Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran RPD, mengacu pada RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, serta dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan sinergi pembangunan daerah, ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 yaitu **“Menguatkan Pembangunan SDM yang Berkualitas dan Pertumbuhan Ekonomi yang Merata, dan Berdaya Saing menuju Tulang Bawang Aman, Mandiri dan Sejahtera”** Selanjutnya, tema tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Kondusif dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara;
2. Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat, Dunia Usaha, Investasi serta Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Secara Optimal untuk Kesejahteraan Masyarakat;
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan;
4. Meningkatkan Kesejahteraan Kampung;
5. Terwujudnya SDM yang berkualitas;
6. Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas;
7. Penataan Ruang dan Pengelolaan SDA yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Tahun 2024, tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Derajat Kejenuhan Jalan	0,30
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan Perairan	2. Persentase Wilayah Alur Sungai yang Terlayani Angkutan Perairan	30%
2.	Mewujudkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Kualitas Pengelolaan Keuangan Dinas Perhubungan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	3. Nilai/ Predikat SAKIP Dinas Perhubungan	70

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
- a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 - c. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - d. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGELOLA PELAYARAN

- a. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota
 - Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah /Kabupaten/Kota

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2.15 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan		70	4,735,568,315		70	4,769,810,615
2.15 . 01. 2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		100%	6,270,000		100%	19,500,000
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Tulang Bawang	20 laporan	6,270,000		20 laporan	19,500,000
2.15 . 01. 2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Dinas Perhubungan		100%	4,384,420,715		100%	4,385,421,715
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Perhubungan)	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Tulang Bawang	12 laporan	779,025,000		12 laporan	779,025,000
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Tulang Bawang	31 orang/ bulan	3,605,395,715		31 orang/ bulan	3,606,396,715
2.15 . 01. 2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)		83	3,650,000		83	4,250,000
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Tulang Bawang	2 orang	3,650,000		2 orang	4,250,000
2.15 . 01. 2. 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		74%	58,702,700		74%	82,494,000
2.15 . 01. 2. 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Tulang Bawang	1 paket	1,763,200		1 paket	1,763,200
2.15 . 01. 2. 06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tulang Bawang	9 paket	13,921,000		9 paket	22,094,000
2.15 . 01. 2. 06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Tulang Bawang	1 paket	1,080,500		1 paket	1,080,500
2.15 . 01. 2. 06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tulang Bawang	3 paket	20,150,000		3 paket	25,000,300
2.15 . 01. 2. 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perhubungan	Kab. Tulang Bawang	22 laporan	21,788,000		22 laporan	32,556,000
2.15 . 01. 2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	144,450,800		100%	140,070,800
2.15 . 01. 2. 08 . 02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tulang Bawang	12 laporan	47,070,800		12 laporan	47,070,800
2.15 . 01. 2. 08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tulang Bawang	12 laporan	97,380,000		12 laporan	93,000,000

2.15 . 01. 2. 09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Perhubungan dalam kondisi baik		89%	138,074,100		89%	138,074,100
2.15 . 01. 2. 09 . 01	Penyediaan Jasa Peneliharaan, Biaya Peneliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tulang Bawang	14 unit	129,218,100		14 unit	129,218,100
2.15 . 01. 2. 09 . 11	Peneliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kab. Tulang Bawang	21 unit	8,856,000		21 unit	8,856,000
2.15 . 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan		100%	5,084,348,200		100%	4,993,621,900
2.15 . 02. 2. 01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Rencana Induk Jaringan LLAJ yang Terpadu dan Tersosialisasi		100%	3,600,000		100%	7,515,000
2.15 . 02. 2. 01 . 04	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten /Kota	Kab. Tulang Bawang	1 dokumen	3,600,000		1 dokumen	7,515,000
2.15 . 02. 2. 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang laik fungsi		84%	4,854,248,200		84%	4,839,606,900
2.15 . 02. 2. 02 . 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Tulang Bawang	110 unit	4,854,248,200		110 unit	4,839,606,900
2.15 . 02. 2. 05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Angkutan Umum dan Barang yang lulus uji berkala kendaraan bermotor		38%	152,500,000		38%	72,500,000
2.15 . 02. 2. 05 . 01	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kab. Tulang Bawang	3500 unit	137,500,000		3500 unit	57,500,000
2.15 . 02. 2. 05 . 07	Peneliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kab. Tulang Bawang	9 unit	15,000,000		9 unit	15,000,000
2.15 . 02. 2. 06	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ruas Jalan Kabupaten/Kota yang Telah Dilakukan MRL		100%	74,000,000		100%	74,000,000
2.15 . 02. 2. 06 . 04	Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tulang Bawang	12 laporan	74,000,000		12 laporan	74,000,000
2.15 . 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			100%	25,000,000		100%	36,514,000
2.15 . 03. 2. 07	Penetapan Lintas Penyeberangan Dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapal yang Memiliki Izin Pengoperasian Angkutan Penyeberangan		51,4%	25,000,000		51,4%	36,514,000
2.15 . 03. 2. 07 . 02	Pengendalian Dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan Dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tulang Bawang	12 laporan	25,000,000		12 laporan	36,514,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian sasaran dan tujuansesuai dengan RPD Kabupaten Tulang Bawang 2023 – 2026. Rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2025 mencakup 3 program terdiri 11 kegiatan dan 19 sub kegiatan yaitu:

Tabel 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran Tahun 2025
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	70	4,735,568,315
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	6,270,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 laporan	6,270,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Dinas Perhubungan	100%	4,384,420,715
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Perhubungan)	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 laporan	779,025,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 orang/ bulan	3,605,395,715
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	83	3,650,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 orang	3,650,000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	74%	58,702,700
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1,763,200
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	13,921,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1,080,500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	3 paket	20,150,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perhubungan	22 laporan	21,788,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	144,450,800
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	47,070,800

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran Tahun 2025
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	97,380,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Perhubungan dalam kondisi baik	89%	138,074,100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	129,218,100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	21 unit	8,856,000
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)	Persentase Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	5,084,348,200
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Rencana Induk Jaringan LLAJ yang Terpadu dan Tersosialisasi	100%	3,600,000
Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten /Kota	1 dokumen	3,600,000
Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang laik fungsi	84%	4,854,248,200
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	110 unit	4,854,248,200
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Angkutan Umum dan Barang yang lulus uji berkala kendaraan bermotor	38%	152,500,000
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersed	3500 unit	137,500,000
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	15,000,000
Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ruas Jalan Kabupaten/Kota yang Telah Dilakukan MRLL	100%	74,000,000
Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	74,000,000
Program Pengelolaan Pelayaran		100%	25,000,000
Penetapan Lintas Penyeberangan Dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapal yang Memiliki Izin Pengoperasian Angkutan Penyeberangan	51,4%	25,000,000
Pengendalian Dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan Dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	25,000,000

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, dan program kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 mencakup tiga bahasan yaitu :

5.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kampung/Kelurahan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini berdasarkan pada RPD serta Renstra.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah. dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah. dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap mental semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*) tetap harus di kedepankan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar

programkegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yangberfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimanapelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan instrumen pengendalian tersebut. diharapkan terjadi kesesuaianantara perencanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam targetcapaian pada setiap tahapan dengan pelaksanaannya dan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya prefentif dan kolektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Komitmen, konsistensi, disiplin, kerja keras, semangat dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Dinas Perhubungan mutlak diperlukan untuk tercapainya sasaran perangkat daerah tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan sebagai landasan, pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

Menggala, 16 Juli 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TULANG BAWANG,**
Drs. A M R I, M.I.P.
NIP. 19650322 198603 1 005